LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA

ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR TAHUN 1995-2005 DENGAN METODE INDEKS THEIL DAN INDEKS L

Oleh :

Ro'ufah Inayati, S.Pd
Grisvia Agustin, S.E

DIBIAYAI DIPA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NO.008/SP2H/PP/DP2M/III/2007 TANGGAL 29 MARET 2007 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2007

LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA

ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TIMUR TAHUN 1995-2005 DENGAN METODE INDEKS THEIL DAN INDEKS L

Oleh :

Ro'ufah Inayati, S.Pd
Grisvia Agustin, S.E

DIBIAYAI DIPA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NO.008/SP2H/PP/DP2M/III/2007 TANGGAL 29 MARET 2007 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2007

RINGKASAN

Kata Kunci : distribusi pendapatan daerah, Indeks Theil, Indeks L, profil daerah

Ketimpangan distribusi pendapatan pada Propinsi Jawa Timur dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Dalam kaitannya dengan hal ini, tentunya dibutuhkan informasi mengenai keadaan pemerataan pendapatan berdasarkan daerah.

Ada beberapa ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, salah satu indikator untuk menilai atau menggambarkan tingkat ketidakmerataan pembagian pendapatan penduduk suatu negara atau daerah adalah Indeks Theil *(Theil Index)* dan Indeks L *(L-Index)*. Kedua metode tersebut pada dasamya bertolak pada hal yang sama yaitu dapat dipecah-pecah *(decomposable)* menjadi komponen dalam grup dan komponen antar grup. Atas dasar pembandingan itulah dibuat ukuran-ukuran kemerataan/ketimpangan pendapatan. Indeks Theil bermanfaat untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang hanya berdasarkan rataan pendapatan. Sedangkan Indeks L bermanfaat untuk menggambarkan pengaruh faktor demografi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa pada Propinsi Jawa Timur mempunyai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif menurun secara keseluruhan setelah krisis ekonomi. Penurunan ketimpangan distribusi pendapatan setelah krisis ekonomi tersebut bukan disebabkan karena pendapatan golongan masyarakat menengah ke bawah meningkat tetapi karena pendapatan masyarakat golongan menengah ke atas yang menurun secara drastis.

SUMMARY

Keyword : regional income disparity, Theil Index, L Index

Income disparity of East Java Province may caused by differences of regional growth and limited resources of each regions. Development is tend to centralized in rich region. According to those reasons, it is important to get more information about regional income disparity.

There are so many measurement of income disparity, two of them are Theil Index and L Index. Those two measurement are decomposable into 2 components, which are within group component and between group component. Theil Index only able to measure income disparity based on income average data. L Index able to describe demography factor's effect to income disparity.

The result is after monetary crisis in Indonesia, income disparity in East Java become lower than before. It caused by decreasing of upper crust public's income, not by increasing of lower crust public's income. The evidence is from deterioration of overall regional income of East Java Province.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY ii

PRAKATA iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR.. vi

DAFTAR LAMPIRAN.. vii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 33

BAB IV METODE PENELITIAN 35

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 47

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Di negara-negara sedang berkembang titik berat pembangunan nasional diletakkan pada bidang ekonomi, karena meningkatnya hasil-hasil di bidang ekonomi akan dapat menyediakan sumber-sumber dana pembangunan sehingga dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan dan didorong oleh pembangunan bidang lain yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi adalah :

1. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, yang dapat terwujud bila tingkat pertumbuhan GDP melebihi tingkat pertambahan penduduk pada satu tahun.
2. Usaha untuk melakukan perubahan dalam struktur perekonomian yang umumnya masih bersifat tradisional (Sukimo, 1985: 14).

Pembanguan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada periode setelah Perang Dunia II (PD II), strategi pertumbuhan ekonomi merupakan strategi yang dirujuk banyak negara dalam melakukan pembangunan ekonomi. Target utama strategi tersebut adalah peningkatan output sektor ekonomi yang dominan, sehingga pendapatan nasional Negara yang bersangkutan akan meningkat. Melalui proses *trickle down effect*, diharapkan hasil pembangunan dengan strategi pertumbuhan ekonomi tersebut akan mengalir pada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum baik masyarakat golongan penghasilan menengah ke atas maupun golongan penghasilan menengah ke bawah menjadi meningkat.

Pengalaman yang diperoleh oleh banyak negara yang mengaplikasikan strategi pertumbuhan ekonomi adalah pada satu sisi strategi pembangunan ekonomi memang meningkatkan pendapatan nasional, tetapi pada sisi lain strategi tersebut memunculkan masalah lain yang cukup serius yaitu masalah ketidakmerataan pendapatan. Perlu suatu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi distribusi pendapatan ini. Karena makna dari proses pembangunan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang berarti juga memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan seluruh masyarakat.

Menurut Lincolin Arsyad bahwa dinegara-negara miskin yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan melawan distribusi pendapatan (Arsyad, 1997 : 206). Mc Namara juga menyarankan agar pemerintah negara berkembang mengubah agar kebijaksanaan pembangunan untuk mengurangi golongan penduduk miskin sebesar 40% dari jumlah penduduk itu, tanpa mengorbankan tujuannya untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Dari pengalaman pembangunan di Pakistan, Mahbub Ul-Haq mencatat bahwa pembangunan yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi akan berakibat pada semakin lebarnya jurang antara yang kaya

dan yang miskin. Dudley Seer juga berpendapat bahwa proses pembangunan akan bermakna bila proses tersebut mampu mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Supriatna, 2000 : 30). Ketidakmerataan pembagian pendapatan ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dengan basil produksi yang dapat dinikmati oleh selapisan masyarakat yang tertentu saja, dapat menimbulkan ketidakstabilan dan keresahan, yang dengan sendirinya akan mengganggu kestabilan dalam suasana kehidupan masyarakat (BPS, 1994 : 4).

Proses pembangunan di Indonesia dan serangkaian kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dewasa ini telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang merupakan pertanda berhasilnya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Hal ini berarti pula sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Namun disamping keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut masih dihadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerataan, terutama pemerataan pembagian pendapatan. Persoalan pertama adalah masih cukup banyaknya penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan kedua adalah masih adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau sering dikatakan sebagai kemiskinan relative. Kesenjangan ini ada dan akan makin parah ketika laju pertumbuban ekonomi makin cepat dan pemerataan pembagian pendapatan masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini akan dirasakan sebagai suatu keadaan yang kurang adil, dapat menimbulkan masalah sosial, politik, disamping masalah ekonomi yang tercipta.

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Jadi berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti dari pembangunan. Sebagai tambahan berupa rekor meratanya distribusi pendapatan agaknya merujuk pentingnya kualitas proses pembangunan. Yang penting tidak hanya meningkatkan "kue nasional" namun juga bagaimana "kue" tersebut didistribusikan secara merata. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Sejak Pelita III yang dilaksanakan oleh negara kita melalui program-program Repelita yang bertahap, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan masalah pemerataan. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan menempatkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan pada urutan pertama Trilogi Pembangunan. Dengan menempatkan strategi pemerataan hasil-hasil pembangunan pada prioritas pertama, pemerintah telah mulai meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan lebih merata dan memperluas kesempatan kerja. Penerapan kebijaksanaan ini diarahkan pada berbagai upaya pembangunan yang dapat menciptakan swadaya dan swakarsa penduduk untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Secara ekonomis, kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan yang cukup tinggi berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kebijaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, terutama penduduk miskin agar dapat menikmati pembangunan serta hasil-hasilnya yang telah dicapai. Penerapan kebijaksanaan ini dilakukan melalui konsep Delapan

Jalur Pemerataan, yang meliputi :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya makanan, pakaian, dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan (BPS, 1994: 1).

Agar upaya pemerataan pembagian pendapatan tersebut berhasil, dalam arti menjadi lebih baik (tingkat ketimpangan menurun), pemerintah perlu merumuskan suatu kebijaksanaan pemerataan. Dalam Repelita disebutkan bahwa arah kebijaksanaan pemerataan pendapatan adalah mempertinggi penghasilan kelompok masyarakat dengan mata pencaharian yang penghasilannya rendah, agar golongan yang berpenghasilan rendah ini terangkat hidupnya. Masalah pemerataan merupakan masalah yang kompleks, karena berkaitan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dengan alasan-alasan, masyarakat memandang pemerataan sebagai tujuan yang sudah sewajarnya dicapai karena implikasi moralnya dan kaitannya erat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagipula, kebijakan yang mendorong pemerataan dapat membantu mengurangi kemiskinan ketika pendapatan lebih merata maka jumlah

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang. Kebijakan yang berorientasi pemerataan dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Di dalam beberapa tahapan Pelita yang dilaksanakan secara konsisten, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya memperhatikan masalah pemerataan. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kestabilan nasional yang sehat dan dinamis. Pemerataan disini berkaitan dengan pembagian pendapatan nasional *(distribution of national income).* Pertumbuhan ekonomi *(economic growth)* berkaitan dengan peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Stabilitas berkaitan dengan kondisi politik dan ekonomi yang mantap. Dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi, stabilitas dijabarkan dalam bentuk kemantapan dalam harga barang, yang ditandai dengan tingkat inflasi yang rendah.

Kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tersebut juga didukung oleh banyak ahli ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa pemerataan yang lebih adil di negara-negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat penunjang pertumbuhan ekonomi dengan alasan pertama, orang-orang kaya tidak dapat diharapkan kemampuanya dalam menabung dan menginvestasikan pendapatan mereka dalam perekonomian setempat, karena mereka membelanjakan pendapatannya untuk barang impor yang mewah dan menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas, perhiasan, dan rekening pada bank-bank asing. Dengan demikian orang kaya di negara berkembang tidak menabung dan menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang cukup dari pendapatan mereka (yang

berarti tabungan dan investasinya benar-benar produktif pada perekonomian dalam negeri). Kedua, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin dapat menurunkan produktivitas pendapatan juga rendah, dan akan berakibat daya beli kelompok tersebut juga akan lemah dan akhirnya permintaan efektif dalam pasar sulit untuk berkembang, kecuali untuk kelompok yang berpendapatan tinggi. Dengan lambatnya permintaan efektif, maka satuan-satuan usaha yang memproduksi barang dan jasa juga lambat berkemhang Sejalan dengan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan pula rendahnya pertumbuhan ekonomi. Di pihak lain, strategi untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat golongan bawah akan membantu tidak hanya kecukupan materi tetapi juga meningkatkan produktivitas dan perekonomian secara keseluruhan. Ketiga, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya mengurangi kemiskinan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan akan memperkuat integrasi nasional sehingga merangsang tumbuhnya perekonomian yang sehat karena semakin besarnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Sementara kesenjangan pendapatan yang besar dapat merupakan penghambat bagi kemajuan ekonomi (Todaro, 1985 : 165-166).

Sasaran yang hendak dicapai oleh pembangunan nasional di Indonesia antara lain untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan secara seimbang di berbagai daerah, serta dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak harus bertumpu pada daerah yang sudah maju saja, melainkan juga perlunya pemerataan pada daerah yang dalam perkembangannya masih lambat. Karena pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk membangun daerah dan menyelaraskan pertumbuhan antar daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan jika suatu bangsa ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan segala sumber daya yang ada, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Definisi pembangunan tersebut mempunyai arti yang sangat luas sehingga untuk mengukur keberhasilan pembangunan, indikator yang selalu digunakan adalah berdasarkan keadaan ekonominya, karena indikator ekonomi mudah dihitung secara kuantitatif

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dengan memakai berbagai cara dan tolok ukur. Salah satu yang lazim digunakan ialah dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Ukuran ini lazim digunakan karena selain dapat dipakai untuk mengetahui pendapatan perkapita juga dapat untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari PDB memungkinkan pula dihitung pendapatan per kapita serta pertumbuhannya. PDB yang secara sektoral dihitung melalui kegiatan ekonomi dari dunia usaha *(establishment)*. Masalah ketimpangan ini akan terus berlangsung bila tidak ada upaya yang secara khusus diarahkan pada pemecahannya. Mereka yang berada di lapisan atas umumnya lebih mampu meningkatkan keahlian melalui pendidikan yang lebih tinggi sehingga mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mendapatkan balas jasa yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengalaman pembangunan selama dekade yang lampau, maka menjatuhkan pilihan pembangunan terutama kepada mereka yang miskin sangatlah penting. Oleh karena pada golongan yang miskin inilah yang menderita kemunduran dalam pembagian pendapatan selama proses pembangunan berlangsung, sedangkan jumlahnya tidak saja besar tetapi akibat pertambahan penduduk senantiasa meningkat, masa depan kelompok ini tidak bertambah baik, tetapi sebaliknya (Salim, 1976 : 12).

Ketimpangan distribusi pendapatan pada Propinsi Jawa Timur dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini dapat menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar. Dalam kaitannya dengan hal ini, tentunya dibutuhkan informasi mengenai keadaan pemerataan pendapatan berdasarkan daerah.

Untuk memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Propinsi Jawa Timur, berikut ini tabel PDRB menurut Kabupaten dan Kota. Dari tahun 1995 menuju tahun 1997 terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat berarti. Tetapi pada tahun 1998 pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar negatif 16,12% karena disebabkan oleh adanya kontraksi akibat krisis moneter. Ternyata pada tahun 1999, pertumbuhan PDRB Jawa Timur menjadi 1,21%. Dan terus meningkat, pada tahun 2000 menjadi 3,26%. Tahun 2001, pertumbuhan PDRB di Jawa Timur sebesar 3,34%. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mulai tahun 1999 diperkirakan telah menjadi positif karena adanya pemulihan perekonomian Indonesia (BPS, 2005 : 44)

Tabel 1.1 PDRB Menurut Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Tahun 1996, 1998, 2000, 2002 dan 2005 Atas Dasar Harga Konstan 1993

(juta rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	1996	1998	2000	2002	2005
	Kabupaten					
1	Pacitan	394.688,83	373.386,45	393.890,40	409.054,23	398.916,06
2	Ponorogo	653.128,62	622.343,44	696.430,55	726.978,93	325.979,79
3	Trenggalek	401.760,08	382.434,78	408.774,44	436.303,60	489.644,96
4	Tulungagung	1.261.330,75	1.130.629,43	1.240.378,00	1.331.356,94	1.907.412,11
5	Blitar	773.452,57	731.426,93	811.028,74	849.653,13	1.512.418,99
6	Kediri	1.476.469,30	1.309.233,03	1.421.012,65	1.508.119,34	1.589.977,95
7	Malang	2.455.226,19	2.267.707,37	2.390.599,67	2.594.245,84	3.622.872,29
8	Lumajang	1.007.248,39	884.621,59	918.915,61	983.951,62	1.479.024,96
9	Jember	1.970.760,81	1.779.848,01	1.869.807,40	2.042.435,38	2.797.809,45
10	Banyuwangi	1.878.409,56	1.676.532,84	1.735.699,46	1.854.001,42	2.485.181,84
11	Bondowoso	607.982,73	575.351,56	593.555,70	645.596,46	569.977,85
12	Situbondo	747.483,98	689.230,42	711.558,52	773.436,98	942.128,49
13	Probolinggo	1.284.275,76	1.183.332,32	1.200.419,02	1.287.204,28	1.706.632,69
14	Pasuruan	2.669.459,48	2.429.907,37	2.559.430,38	2.756.618,38	1.742.059,64
15	Sidoarjo	5.480.071,56	4.532.682,05	4.764.362,31	5.204.759,49	7.451.523,14
16	Mojokerto	1.200.113,74	1.041.508,54	1.107.734,51	1.190.877,87	1.633.097,15
17	Jombang	1.037.087,41	941.323,53	976.881,46	1.060.768,49	1.601.983,37
18	Nganjuk	835.052,49	746.023,21	768.425,45	828.615,36	1.213.189,08
19	Madiun	545.774,21	499.565,27	507.954,43	551.308,17	731.737,53
20	Magetan	621.887,11	560.907,08	586.149,56	640.121,85	842.776,40
21	Ngawi	691.225,54	639.807,35	663.583,12	714.801,02	791.289,90
22	Bojonegoro	928.127,99	850.472,27	874.332,78	934.311,82	1.572.299,73
23	Tuban	1.780.065,73	1.380.612,44	1.604.188,72	1.742.471,62	1.559.377,38
24	Lamongan	955.295,91	886.854,94	928.487,62	1.003.355,05	1.168.917,38
25	Gresik	3.445.763,08	3.005.954,69	3.293.233,81	3.629.243,58	3.960.387,55
26	Bangkalan	675.074,18	629.165,18	638.994,69	666.934,24	908.534,87
27	Sampang	638.891,69	618.389,92	635.358,81	679.757,33	706.518,45
28	Pamekasan	525.240,41	481.796,08	491.292,42	514.390,86	575.770,47
29	Sumenep	902.535,32	944.835,53	936.803,46	885.499,34	1.416.734,68
	Kota					
1	Kediri	1.994.580,90	4.853.529,15	4.896.548,90	4.603.473,71	6.833.236,45
2	Blitar	266.346,72	239.616,48	249.478,92	276.930,27	178.005,77
3	Malang	2.513.505,15	2.074.986,17	2.114.928,50	2.243.721,37	3.198.169,85
4	Probolinggo	603.368,81	515.409,22	522.208,21	564.375,87	501.486,37
5	Pasuruan	335.384,15	309.940,36	328.779,32	362.982,40	285.468,61
6	Mojokerto	309.746,32	282.297,34	297.926,29	343.380,42	319.291,48
7	Madiun	451.972,34	393.742,29	408.346,55	454.293,69	305.215,85
8	Surabaya	14.445.471,15	11.933.442,11	12.302.742,94	13.458.725,86	20.520.952,85
9	Batu	-	-	-	193.881,65	332.468,26
	Jawa Timur	**58.794.258,96**	**54.398.896,74**	**56.850.243,32**	**60.947.937,86**	**80.678.470,15**

Sumber : PDRB Jawa Timur Menurut Kabupaten dan Kota (BPS, berbagai tahun terbitan)

Banyak konsepsi yang direkomendasikan oleh para ahli, salah satu diantaranya adalah pengukuran ketidakmerataan pembagian pendapatan atau distribusi pendapatan

dengan menggunakan Indeks Theil dan Indeks L. Karena Indeks Theil dan Indeks L dapat dipecah-pecah *(decomposable)* menjadi komponen dalam grup dan antar grup. Sehingga dapat diketahui ukuran ketimpangan dalam Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota. Digunakan tahun 1995-2005 adalah karena data yang diperoleh berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pada tahun 1998 merupakan awal mula krisis di daerah. Sedangkan untuk tahun 2005 adalah data terbaru yang ada di BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi setelah melalui awal masa krisis moneter. Dengan demikian dapat dilihat pola distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum krisis moneter sampai saat krisis tersebut berlangsung. Bertolak dari uraian diatas, maka penelitian deskriptif kuantitatif tentang Disparitas Distribusi Pendapatan di Jawa Timur Tahun 1995-2005 Menggunakan Indeks Theil dan Indeks L menjadi begitu menarik dan penting dilakukan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola ketimpangan distribusi pendapatan di Propinsi Jawa Timur tahun 1995-2005.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan angka Indeks Theil komponen dalam grup di Propinsi Jawa Timur di tahun 1995-2005.
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan angka Indeks Theil komponen antar

grup di Propinsi Jawa Timur di tahun 1995-2005.

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan angka lndeks L komponen dalam grup di Propinsi Jawa Timur di tahun 1995-2005.

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan angka Indeks L komponen antar grup di Propinsi Jawa Timur di tahun 1995-2005.